

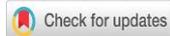


## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN KINERJA SEKOLAH

Robet Januar Simanjuntak<sup>1</sup>, Ahmad Suriansyah<sup>2</sup>, Ratna Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: [juntakplh23@gmail.com](mailto:juntakplh23@gmail.com)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.668>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 3 May 2025

Final Revised: 23 May 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 28 June 2025

#### Keywords:

School Operational Assistance

School Performance

Educational Quality

Educational Policy



### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) policy in improving school performance, particularly in terms of financial management, the quality of learning, and school governance. BOS is a strategic government program designed to support the delivery of equitable and quality basic education services. In its implementation, BOS funds are used to finance routine school operational needs and to enhance student participation and learning outcomes. The method used in this study is descriptive qualitative, employing literature review and field observation approaches. The findings indicate that the implementation of the BOS policy generally has a positive impact on improving school performance, especially in the provision of educational infrastructure, teacher professionalism development, and improved access to quality learning. However, the effectiveness of this program is highly influenced by the management capacity of schools, transparency in financial reporting, and the involvement of stakeholders such as school committees and the community. Therefore, strengthening governance, continuous supervision, and technical training in BOS fund management are key to optimizing the implementation of the BOS program in order to achieve better educational quality outcomes.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan kinerja sekolah, khususnya dari segi pengelolaan keuangan, mutu pembelajaran, dan tata kelola sekolah. BOS merupakan program strategis pemerintah dalam mendukung terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang merata dan bermutu. Dalam implementasinya, dana BOS digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional rutin sekolah serta meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan BOS secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah, terutama dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan, pengembangan profesionalisme guru, serta peningkatan akses dan kualitas pembelajaran. Namun demikian, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sekolah, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta keterlibatan pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, supervisi yang berkelanjutan, dan pelatihan teknis pengelolaan dana BOS menjadi kunci penting dalam optimalisasi pelaksanaan program BOS untuk mendorong pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik.*

**Kata kunci:** Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kinerja Sekolah, Mutu Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan (Kemendikbud, 2020). Salah satu kebijakan strategis tersebut adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mulai diterapkan sejak tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia sekolah agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas tanpa memungut biaya dari peserta didik. Pebriyanti dan Aliyyah (2024) menambahkan bahwa Dana BOS diperlukan agar dapat memudahkan biaya operasional sekolah untuk siswa serta berkurangnya beban siswa dalam membiayai pendidikannya. Program BOS bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan agar dapat memberikan layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Dana BOS tidak hanya menjadi sumber utama pembiayaan sekolah, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan nasional mampu menjawab tantangan di lapangan. Alokasi dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan dari masyarakat, mendukung kegiatan pembelajaran yang optimal, dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Gumilang & Oktaviany (2022) bahwa Dana BOS diturunkan kepada satuan pendidikan sekolah agar dapat membantu membiayai fasilitas pendidikan siswa, biaya pemeliharaan dan perbaikan sekolah, serta gaji guru.

Namun demikian, pelaksanaan program BOS tidak lepas dari berbagai tantangan. Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan penggunaan dana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Ismail & Sumaila (2020) menyebutkan bahwa dalam hal ini komite sekolah dan pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan pengamatan serta alokasi dana yang dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas kebijakan BOS menjadi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah.

Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan BOS menjadi sangat penting untuk dikaji secara menyeluruh dan mendalam, mengingat program ini menjadi salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menjamin operasional sekolah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Program BOS dirancang untuk menjembatani ketimpangan pembiayaan pendidikan sekaligus mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas tanpa membebani orang tua siswa. Hal ini selaras dengan penelitian Susiani *et al.*, (2022) yang menjelelaskan bahwa dalam peningkatan kualitas pendidikan dibutuhkan fasilitas sekolah yang memadai untuk mendukung terhadap aktivitas pembelajaran pada siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah berjalan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya di tingkat satuan Pendidikan. Luthfia *et al.*, (2023) menambahkan Sekolah tidak boleh menggunakan dana untuk keperluan pribadi, dana tersebut harus dikelola dapat mendukung kegiatan pembelajaran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kontribusi kebijakan BOS dalam meningkatkan kinerja sekolah, yang mencakup berbagai dimensi seperti tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel, penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan yang menunjang kegiatan belajar mengajar, serta

dampaknya terhadap mutu proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dana BOS digunakan sesuai pada skala prioritas keperluan kegiatan akademik untuk memaksimalkan kualitas pendidikan (Fathony & Prianty, 2019). Selain itu, kajian ini juga berupaya mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan kebijakan BOS serta solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat program BOS dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan kinerja sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan regulasi terkait kebijakan BOS. Observasi dilakukan secara langsung di beberapa sekolah dasar dan menengah yang menerima dana BOS, dengan fokus pada aktivitas penggunaan dana, pelaporan keuangan, serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, bendahara BOS, guru, serta komite sekolah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti efektivitas penggunaan dana, transparansi, pengaruh terhadap mutu pembelajaran, serta kendala dalam pelaksanaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta diskusi dengan para ahli di bidang manajemen pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup aspek-aspek penting mulai dari sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, acuan pelaksanaan, pengelola di tingkat sekolah, jenis penggunaan dana, hingga sistem pelaporan yang disajikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 1. Pelaksanaan Kebijakan BOS**

Aspek	Uraian
Sumber Dana	Pemerintah Pusat
Mekanisme Penyaluran	Transfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan data Dapodik
Acuan Pelaksanaan	Juknis BOS dan RKAS yang disusun sekolah
Pengelola di Sekolah	Tim Manajemen BOS: Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah
Jenis Penggunaan Dana	ATK, honor guru non-PNS, perbaikan sarpras, kegiatan belajar, digital
Sistem Pelaporan	ARKAS dan SIPLah

Tabel berikut menggambarkan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Identifikasi terhadap kendala ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS di sekolah.

**Tabel 2. Kendala Implementasi BOS**

No	Kendala	Uraian
1	Kapasitas Manajemen Sekolah	Lemah dalam menyusun RKAS sesuai juknis
2	Kurangnya Pelatihan Teknis	Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari dinas
3	Partisipasi Komite Minim	Komite hanya berfungsi formal tanpa pengawasan nyata
4	Pengawasan Lemah	Kurang intensif dan minim tindak lanjut hasil monitoring
5	Penggunaan Tidak Tepat Sasaran	Dana digunakan untuk administrasi rutin, bukan mutu pembelajaran
6	Masalah Infrastruktur dan Teknologi	Akses internet terbatas dan perangkat digital tidak memadai

### *Pembahasan*

Pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan operasional pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbudristek, 2023). Dana BOS disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah penerima melalui mekanisme transfer dana berbasis data pokok pendidikan (Dapodik), yang berfungsi sebagai basis informasi utama dalam menentukan alokasi. Proses penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurut kajian akademik yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), kebijakan BOS dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Studi tersebut menyoroiti bagaimana BOS berperan dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat tata kelola keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan BOS menjadi objek penting dalam penelitian dan diskusi akademik di lingkungan ULM sebagai upaya mendukung pembangunan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas.

Pelaksanaan program BOS mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang diterbitkan setiap tahun. Juknis tersebut menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana BOS. Dana BOS hanya dipergunakan pada arahan teknis yang berlaku (Uviyanti & Pramuka, 2020). Setiap sekolah diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan satuan pendidikan serta mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sangat penting bagi kepala sekolah untuk menilai setiap aktivitas, penanggungjawab aktivitas dengan memahami mengenai biaya, pengawasan, serta pelatihan yang telah diberikan (Handoko, 2022).

Pelaksanaan program BOS dikelola oleh Tim Manajemen BOS di tingkat sekolah, yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, perwakilan guru, dan komite sekolah. Tim ini bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan penggunaan dana, melaksanakan pengeluaran sesuai RKAS, mencatat dan menyusun laporan penggunaan dana, serta menyampaikan laporan kepada dinas pendidikan dan masyarakat secara berkala.

Dalam praktiknya, BOS dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan operasional sekolah seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), perbaikan sarana dan prasarana ringan, pembayaran honorarium tenaga pendidik tidak tetap, biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta pengembangan profesi guru. Sekolah juga dapat menggunakan dana

BOS untuk mendukung kebutuhan pembelajaran berbasis digital, pengadaan buku teks, dan pelaksanaan asesmen pendidikan.

Namun, pelaksanaan kebijakan BOS sering kali menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun RKAS yang sesuai dengan ketentuan Juknis, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun minimnya pelatihan teknis. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan keuangan berbasis digital menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Masih ditemukan pula praktik penggunaan dana yang kurang tepat sasaran, seperti pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran atau yang tidak mendapat persetujuan komite sekolah. Rendahnya keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan BOS menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol sosial terhadap pemanfaatan dana. Nurrochman *et al.*, (2023) menambahkan bahwa adanya respon positif dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah memberikan efek positif dalam kemajuan sekolah.

Untuk itu, peningkatan kapasitas manajemen BOS di tingkat sekolah menjadi hal yang sangat mendesak. Pelatihan teknis, sistem pendampingan dari dinas pendidikan, serta penggunaan sistem pelaporan digital seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) merupakan langkah-langkah yang dapat mendukung pelaksanaan BOS yang lebih efektif dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dan pemerintah memberikansuatu bentuk tata kelola pendidikan yang lebih sehat (Muizzah *et al.*, 2024). Dengan pengelolaan yang baik dan akuntabel, pelaksanaan kebijakan BOS berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah, mempercepat pencapaian indikator mutu pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, program BOS berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran, penguatan kelembagaan sekolah, serta pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, BOS menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hidayat *et al.*, (2019) menambahkan bahwa anggaran yang terbatas akan menghambat program-program yang sudah dirancang untuk peningkatan kualitas Pendidikan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya intervensi strategis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga pengawas independen. Pendekatan kolaboratif serta peningkatan kapasitas manajemen sekolah menjadi kunci dalam memastikan implementasi BOS yang efektif, akuntabel, dan berdampak nyata pada peningkatan kinerja sekolah.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti rendahnya pemahaman pengelola sekolah terhadap juknis, lemahnya sistem pelaporan dan monitoring, kurangnya pelatihan teknis, minimnya partisipasi komite sekolah, serta tidak optimalnya penggunaan dana untuk peningkatan mutu pembelajaran, menuntut adanya strategi perbaikan yang menyeluruh. Amin *et al.*, (2022) menambahkan bahwa keterlibatan terhadap pengelolaan dana BOS bukan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, namun guru, komite, dan orang tua wali, juga harus ikut andil di dalam pengelolaan dana BOS. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi kepala sekolah, bendahara, dan tim BOS. Selain itu, optimalisasi sistem pelaporan digital berbasis aplikasi ARKAS dan SIPLah menjadi penting agar pelaporan dana menjadi lebih efisien dan akurat, tentunya dengan dukungan infrastruktur dan pelatihan teknis yang memadai.

Transparansi pengelolaan dana juga perlu ditingkatkan dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi harus diperkuat agar pengawasan sosial berjalan secara efektif. Senada dengan Mujiono (2017) dalam pengelolaan dana BOS masih terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi yang dibuat, dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Penggunaan dana BOS juga harus difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran, seperti pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, kegiatan literasi-numerasi, dan asesmen. Terakhir, penguatan koordinasi antar lembaga, seperti sekolah, dinas pendidikan, pengawas, dan lembaga pengawas keuangan, menjadi kunci untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan dan pengawasan program BOS. Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui strategi yang tepat dan konsisten, efektivitas program BOS dapat meningkat dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja sekolah, khususnya dalam hal manajemen keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, serta mutu pembelajaran. Program ini turut berkontribusi pada efisiensi operasional, perluasan akses pendidikan, dan penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti terbatasnya kapasitas manajerial, lemahnya pemahaman terhadap juknis, kurangnya pelatihan dan monitoring, serta rendahnya partisipasi komite sekolah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berupa pelatihan berkelanjutan, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan sinergi antar lembaga. Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, BOS tidak hanya berfungsi sebagai alat pendanaan, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174.
- Fathony, A. A., & Prianty, F. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(1), 1-12.
- Gumilang, D. G., Oktaviany, S. S., & Ashari, M. R. (2022). Dana bos dan pemerataan layanan pendidikan dasar. *Jurnal Al Burhan*, 2(2), 32-41.
- Handoko, C. (2022). Manajemen kepala sekolah/madrasah dalam sistem pengelolaan keuangan. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 8(01).
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UM Mataram*, 7(2), 93-107.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1-18.

- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbudristek. (2023). *Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.
- Muizzah, U., Listianto, G. A., Asâ, A. N. A., & Trihantoyo, S. (2024). Tantangan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sdn Simomulyo 1. *Cendekia Pendidikan*, 3(2), 1-10.
- Mujiono, M. (2017). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen*, 4(2), 257-263.
- Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60-70.
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen keuangan: Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2716-2737.
- Suriansyah, A. (2020). *Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS*. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
- Susiani, O. K., Bagus, I., Arnyana, P., & Suastra, W. (2022). Pengelolaan fasilitas dan prasarana di sekolah: studi perbandingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 173-184.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 471-480.
- Yuliana, S. (2023). *Dampak Kebijakan BOS terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri*. *Jurnal Pendidikan ULM*, 12(1), 55-67.

Copyright holder :

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

**CC-BY-SA**